

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Shinta. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 504.
- Ali, Mahrus, and Ari Wibowo. "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 261.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta: SinarGrafika, 2014.
- Barahamin, Lisa Elisabeth. "Pelaksanaan Sita Marital Dalam Perkara Perceraian." *Lex Et Societatit* 5, no. 4 (2017): 68.
- Fernando, Josua, and Susanti Adi Nugroho. "Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Kepailitan." *Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 339–363.
- Giyanthi, Putu Indri Sri, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin." *Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2022): 39.
- Hafrida, and Helmi. "Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak." *Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 132.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- . *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hiariej, Eddy OS. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi Cetakan Ke 5*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Isfardiyana, Siti Hapsah. "Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana Dalam Pembersan Harta Pailit." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3 (2016): 632.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Arifbeta, 2017.
- Kamahayani, Monitacia. "Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pembersan Harta Pailit PT. Dhiva Inter Sarana Dan Richard Setiawan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169K/Pdt.Sus-Pailit/2017)." *Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): 79.
- Kania, Dede. "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Hukum Yustisia* 4, no. 1 (2015): 55–72.
- Makausi, Christian Israel. "Peranan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana." *Lex Crimen* 8, no. 6 (2019): 53.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan Ke 12*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Ke 9*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Nadhiroh, Anis Nur. "Tanggung Jawab Kurator Terhadap Hak Pekerja." *Notaire* 2, no. 3 (2019): 308.
- Nola, Luthvi Febryka. "Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam

- Proses Kepailitan.” *Negara Hukum* 9, no. 2 (2019): 222.
- Prasetyo, Edwin, and Djuwityastuti. “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Properti Atas Kepailitan Perusahaan Pengembang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/ Pdt.Sus Pemb.” *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019): 76.
- Rahim, Muhammad Ibnu Fajar, Sitti Arkanul Pascahyati Rahim, Muhammad Aman Hijrah Akbar Rahim, Ahmad Ranuwirawan Rahim, and Abdul Rahim. “Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan.” *Pleno Jure* 9, no. 1 (2020): 48.
- Ririhena, Muhamad Angga, Teng Berlianty, and Sabri Fataruba. “Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 Terhadap Jamaah First Travel.” *TATOHI: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2021): 88–95.
- Rorong, Yolán Dorneka. “Kajian Hukum Tentang Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dengan Memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 1962 Tertanggal 25 April 1962.” *Lex Privatum* 6, no. 1 (2018): 72.
- Santoso, Hari Agus. “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU “PTB.”” *Hukum Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 329.
- Saputra, Fahreyz Reza, Pujiono, and Purwoto. “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 47/PID.SUSU-TPK/2019/PNSMG).” *Diponegoro Law Journal* 10, no. 1 (2021): 125.
- Sidabutar, Lambok Marisi Jakobus. “Hukum Kepailitan Dalam Eksekusi Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti.” *Anti Korupsi Integrasi* 5, no. 2 (2019): 84.
- Siraji, Hafizh. “First Travel Fraud Case and the Legal Protection for the Victims.” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 3 (2021): 267–280.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat Cetakan Ke 15*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Subhan, Hadi. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktek Di Pengadilan Cetakan Ke 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2009.
- Sudikna, I Kadek, I Ketut Sukadana, and I Nyoman Gede Sugiarta. “Proses Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika.” *Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 50.
- Sulardi, and Yohana Puspitasari Wardoyo. “Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt.” *Jurnal Yudisial* 8, no. 3 (2015): 259.
- Waluyo, Bambang. “Relevansi Doktrin Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Di Indonesia.” *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 211.
- Wendi, and Firman Wijaya. “Penerapan Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori Terhadap Anak Korban Pencabulan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 195/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr).” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 898.
- Wijayanta, Tata. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 220.

Wiriadinata, Wahyu. "Peranan Aparat Penegak Hukum Dalam Pelanggaran Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 2 (2015): 210.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  
Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)  
Reglement voor de Buitengewesten (RBg)  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)  
Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban  
Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956  
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 1980  
Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018